

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino Leo, 2016, *“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”*, Alfabeta, Bandung.
- Bahrullah Akbar, 2013, *“Akuntansi Sektor Publik Konsep & Teori”*, CV. Bumi Metro Raya, Jakarta Timur.
- Edy Purwanto, M. 2017, *“Metodologi Penelitian Kuantitatif”*, Pustaka Pelajar.
- Hendra Karinga, S. M. 2017, *“Carut Matur Pengelolaan Keuangan Daerah di era Otonomi Daerah”*, Kencana, Depok.
- Safrizal ZA, M. 2020, *“Pedoman Manajemen : Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 dan Dampaknya”*, Jakarta.
- Mardiasmo. 2011, *“Perpajakan”*, Andi, Yogyakarta.
- Rahardjo Adisasmita, 2011, *“Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah”*, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *“Metodologi Penelitian Hukum & Jurimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2013, *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 2005, *“Metodologi Research Jilid I”*, Andi, Yogyakarta.
- Wawan Mas’udi dan Poppy S. Winanti, 2020, *“Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia : Kajian Awal”*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Jurnal/Artikel :

- Dewi Arifah, 2016, *“Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Oleh Anak Pasca Disahkannya Oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”*, Unnes repository, halaman 58.
- Henny Juliani, 2020, *“Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah*

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020*”, *Administrative Law & Governance Journal*, halaman 304.
- Dito Aditia Darma Nasution, 2019, “*Akuntansi Sektor Publik : Mahir dalam Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah*”, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, halaman 24.
- Nurkholis, Moh. Khusaini, 2019, “*Penganggaran Sektor Publik*”, UB Press, Malang, halaman 35.
- Novan Mamonto, 2018, “*Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan*”, *Jurnal Eksekutif*, halaman 17.
- Balgis, Muslimin dan Nina Yusnita, 2018, “*Analisis Proses Pelaksanaan Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buol*”, Universitas Tadulako, halaman 22.
- Atikah Nur Hidayati, 2020, “*Upaya Pemerintah Desa Dalam Menanggapi Dampak Covid-19 Di Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang*”, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, halaman 20.
- I Wayan Wiryawan dan IKIP Saraswati Tabanan, 2020, “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia*”, *Prosiding Seminar Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar*, halaman 185.
- Sahya Anggara dan Pilawati, 2019, “*Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung*”, *Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, halaman 95.
- Denas Symond, 2007, “*Kajian Perencanaan Dan Penganggaran Kesehatan Di Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2006*”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, halaman 122.
- Horacio fernandes Ribeiro, Sumartono dan Ratih Nurpratiwi, 2015, “*Manajemen Anggaran Pemerintah Berbasis Kinerja Di Dinas Kesehatan Distrik Dili Timor Leste*”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, halaman 129.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara & Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara & Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020

Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang & Jasa, dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid19.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran & Percepatan Penanganan Covid19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dan 2019.